BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori ini menjelaskan hubungan antara *stewards* (manajer) dan *principals.* Manajer disini bertindak sesuai dengan kepentingan pemiliknya. Antara kesuksesan dan kepuasan pemilik dalam organisasi memiliki hubungan yang kuat untuk menselaraskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik merupakan asumsi dari teori *stewardship*. Teori *stewardship* ini akan memaksimalkan kekayaan dari organisasi dengan meningkatkan prestasi dari perusahaan. Namun, dengan demikian tidak berarti *steward* ini tidak mempunyai kebutuhan hidup (Irmawati dan Pratolo, 2012, 2013).

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa prilaku manajer akan sesuai dengan kepentingan bersama. Apabila adanya perbedaan kepentingan antara *steward* dan pemilik, maka *steward* akan memilih untuk bekerja sama dan menyesuaikannya dari pada harus menentang perbedaan tersebut. *Steward* menganggap bahwa kepentingan bersama dan berprilaku sesuai dengan pemilik merupakan hal yang rasional sehingga steward lebih berfokus pada usaha untuk mencapai tujuan dari organisasinya

Teori ini menjelaskan bahwa manajer lebih termotivasi pada sasaran utama mereka yaitu kepentingan organisasi dan bukan untuk tujuan/kepentingan individu. Perilaku *steward* menunjukkan bahwa mereka tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha untuk mencapai sasran organisasinya. Implementasi pada penelitian ini yaitu *steward* (badan/lembaga pemerintah) merupakan pihak yang bertindak untuk kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsi dengan tepat, yang pada akhirnya *good governance* dapat tercapai secara baik dan maksimal (Queena, 2012).

2. Teori *Signalling*

Teori ini memberikan asumsi bahwa pemerintah harus bisa mentransfer signal yang baik kepada masyarakat karena pemerintah adalah pihak yang diberikan amanah oleh rakyat serta agar masyarakat bisa terus mendukung pemerintah sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Salah satu signal yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang andal, lengkap, berkualitas dan penjelasannya lebih detail disajikan dalam website pemerintah daerah tersebut. Suatu kinerja yang baik dari pemerintahan harus diinformasikan kepada masyarakat sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi yang digunakan untuk tujuan dari politik (Puspita dan Martani, 2012).

Teori *signalling* ini memiliki kerangka teori yang di dalamnya menyebutkan bahwa suatu dorongan untuk memberikan informasi yaitu karena adanya atau terjadinya asimetri informasi antara pemerintah daerah dengan pihak luar yang khususnya yaitu masyarakat. Suatu pemerintah daerah harus mengurangi asimetri informasi yang terjadi tersebut agar dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Memberikan sinyal yang baik yang berupa laporan keuangan yang positif dan dapat dipercaya kepada masyarakat yang diantaranya menjadi salah satu cara untuk dapat mengurangi asimetri informasi tersebut. Media yang paling efektif bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat yaitu pelaporan keuangannya melalui internet atau website (Pratama, Werastuti dan Sujana, 2015).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu suatu bentuk dari pertanggungjawaban untuk mengelola sumber daya yang telah dipakai dan melaksanakan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas pelaporan keuangan sebagai sarana dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan secara periodi.Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 59 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Inti dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Suatu entitas yang dapat dikatakan akuntabel yaitu suatu entitas yang dapat menyajikan suatu informasi secara terbuka kepada masyarakat

yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil selama entitas itu beroperasi. Informasi yang terdapat di laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu dan sanggup menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang dibutuhkan secara akurat, relevan, konsisten, tepat waktu dan dapat dipercaya. Akuntabilitas ini dilakukan dengan cara menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran maupun tujuan dari suatu entitas yang bersangkutan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator *input* (masukan), *ouputs*(keluaran), proses, *outcomes* (hasil), *benefits* (manfaat), *impact* (dampak)(Arfianti, 2011).

Menurut Arfianti (2011) menyebutkan bahwaakuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedurpelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur

4. Transparansi

Transparansi sangat berkaitan erat dengan informasi. Transparansi merupakan keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi keuangan kepada khalayak umum dengan berasumsi bahwa mereka berhak mengetahui mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan

sumber daya manusia dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan secara terbuka dan menyeluruh agar masyarakat dapat terus mendukung pemerintah dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik (Afrianti, 2011).Salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu dapat menyajikan dan menyebarkan secara luas informasi kepada masyarakat yang dapat mudah dilihat serta diakses oleh masyarakat dan para pengguna informasi tersebut dengan cara mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah lewat internet (Pratolo dan Jatmiko, 2016).

Menurut PP No 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dijelaskan bahwa dalam mengelola keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, mentaati peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan memiliki tanggung jawab dengan mengacu pada asas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat bagi masyarakat.Pengelolaan keuangan daerah yang secara transparan dan akuntabel, dalam penyelenggaraan *good goverment governance* harus dilakukan secara efektif dan efisien. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur transparansi di sektor publik diantaranya yaitu mengukur tingkat keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan publik tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh para pengguna informasi tersebut, serta kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik(Arfianti,2011).

Menurut Arfianti (2011)menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melaluibeberapa indikator :

a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
c. Keterbukaan proses
d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang terdapat pada diri manusia. Potensi tersebut bisa berupa keahlian atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu yang mungkin dari tiap individu tersebut memiliki perbedaan keahlian/kompetensi atau bahkan sama. Potensi tersebut sangat berguna dalam dunia kerja, karena di dalam sebuah lingkungan pekerjaan seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian/kompetensi sesuai dengan pekerjaannya tersebut agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal (Prasetya, 2015).

Para aparatur di SKPD harus mempunyai latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan juga memiliki pengalaman yang berhubungan dengan keuangan agar dalam praktiknya tidak terjadi kekeliruan. Di duga masih banyak daerah yang belum memberlakukan transparansi diakibatkan karena masih sedikitnya sumber daya manusia di bidang akuntansi yang mengakibatkan banyak terjadinya kesalahan dalam sistem akuntansi. Kegagalan dari sumber daya manusia tersebut dapat

mengacu timbulnya kekeliruan pada laporan keuangan yang mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan standar yang di tetapkan oleh pemerintah(Arfianti,2011). Sumber daya manusia dikatakan berkompeten apabila SDM tersebut mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu kompetensi yang perlu dimiliki yaitu kompetensi di bidang akuntansi. Dengan adanya kompetensi di bidang akuntansi tersebut dapat membantu mencapai aspek akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan yang disusun tersebut (Prasetya, 2015).

Menurut Sudiarianti (2013) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
2. Keahlian (*Skill*)
3. Perilaku (*Attitude*)

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SPI berperan untuk mencegah dan mendeteksi suatu penggelapan (*fraud*) dengan melakukan pengarahan, pengawasan dan pengukuran terhadap sumber daya dari organisasi tersebut. Pengendalian intern berisi tentang suatu kebijakan serta prosedur yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai suatu sasaran organisasi dan memberikan informasi keuangan yang andal serta dapat menjamin peraturan-peraturan dan

hukum yang berlaku tersebut dapat ditaati (Nurillah, 2014).Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, menjelaskan bahwa suatu SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan secara menyeluruh di suatu lingkungan pemerintah pusat maupun di lingkungan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern memiliki fungsi yang dapat memberi keyakinan yang memadai agar dalam proses akuntansi dapat tercipta efektifitas serta efisiensi terutama dalam hal untuk membuat suatu laporan keuangan yang andal. Sistem pengendalian intern yang baik dapat mendeteksi terjadinya kecurangan serta dapat mencapai tujuan suatu entitas yang bersangkutan yang secara umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan, pelaporan keuangan yang handal, kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan (Mahaputra dan Putra, 2014).

Menurut Sudiarianti (2013) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

7. Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan menjadi salah satu syarat dan dasar yang memiliki kekuatan hukum pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Jadi pada saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus berpedoman dan mengacu pada prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah (Langelo dkk, 2015).

Standar akuntansi pemerintahan menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan berkualitas apabila selama proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (Mahaputra dan Putra, 2014).

Indikator dari standar akuntansi pemerintahan menurut Sumarjo (2010) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, penyajian laporan keuanganterdiri sebagai berikut:

1. Basis akrual.

   Basis akrual merupakan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah. Entitas pelaporan menyelenggarakan dan menyajian laporan keuangannya menggunakan basis akrual baik dalampengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas.

2. Komponen laporan keuangan.

   Dalam laporan keuangan terdapat komponen-komponen yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporanfinansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

   a. Laporan Realisasi Anggaran.
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
   c. Laporan Operasional.
   d. Laporan Arus Kas.
   e. Laporan Perubahan Ekuitas.
   f. Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Periode Pelaporan

Penyajian laporan keuangan yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan penyajian laporankeuangan tahunan dinyatakan dengan suatu periode yang lebih panjang ataulebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasiseperti berikut:

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

8. Pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan Keputusan Presiden No 74 Tahun 2001 yang menjelaskan mengenai Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan suatu proses aktivitas yang diberikan untuk memberikan jaminan supaya pemerintah daerah dapat berjalan seperti rencana serta sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Selama berlangsungnya proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD dilakukan pengawasan oleh dewan. Pengawasan tersebut digunakan untuk mengetahui bahwa suatu perencanaan-perencanaan yang telah disusun tersebut dapat berjalan secara

efektif, efisien dan ekonomis (Armando, 2013). Pengawasan keuangan daerah digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dengan tujuan tertentu. Dengan adanya pengawasan keuangan tersebut diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan dan rencana yang telah direncanakan dan ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengawasan keuangan yang baik dilakukan dari mulai penyusunan sampai dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Pujiswara dkk, 2014).

Menurut Arfianti (2011) menyebutkan bahwa pengawasan keuangan daerah dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Evaluasi kegiatan
3. Pencatatantransaksi berdasarkan bukti
4. Pencatatantransaksi tepat waktu
5. Dokumentasi buktitransaksi
6. Sistem pengawasanpelaksanaan tugas
7. Laporan keuanganSKPD yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

9. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah sebuah media untuk sebuah entitas dalam penelitian ini adalah pemerintah yang digunakan untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya pada publik. Laporan

keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kemudian akandigunakan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan dan digunkan sebagai dasar untukpengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tercantum dalamLaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya (Windiastuti, 2013).

Dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut standar akuntansi pemerintahan pada Undang-undang No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa dikatakan berkualitas jika laporan keuangan itu memenuhi karakteristik kualitatif diantaranya yaitu :

a. Relevan

Menurut Sukmaningrum (2012), dikatakan relevan jika informasi dalam laporan keuangan tersebut:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
2. Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan berdasarkan pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini (*predictive value*)

3. Informasi dikatakan relevan jika tersedia tepat waktu (*timeliness*) sehingga dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan manajerial.
4. Disajikan selengkap mungkin yang mencakup semua informasi keuangan.

b. Andal

Menurut Sukmaningrum (2012) suatu informasi dikatakan andal jika:

1. Dapat diuji kebenarannya (verifiabel)

   Kemampuan informasi yang diuji kebenarannya meskipun oleh orang yang berbeda, dengan menggunakan metode yang sama, akan tetap menghasilkan hasil akhir yang sama pula.

2. Netral

   Tidak memliki/adanya unsur bias dalam penyajian laporan keuangan.

3. Penyajian secara wajar/jujur

   Dapat menggambarkan keadaan secara wajar, jujur dan lengkap, dapat menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut.

c. Dapat dibandingkan

Dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat dibandingkan, baik dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas.

d. Dapat dipahami

Dikatakan memiliki manfaat apabila dapat dipahami dengan mudah oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan tersebut.

B. Penurunan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu

1. Sumber Daya Manusia

SDM diperlukan dalam mengelola keuangan daerah, terutama SDM yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang akuntansi sehingga dapat mencapai aspek akuntabilitas dan transparansi. Jika terjadi kekurangan kompetensi dalam sumber daya manusia maka dampak yang ditimbulkan adalah pada sistem akuntansi yang berjalan tidak baik. Dengan adanya SDM yang berkompeten di bidang akuntansi, sehingga akan dengan mudah menyampaikan logika akuntansi di SKPD tersebut sehingga menjadi mudah dipahami dan dapat mendorong sistem akuntansi berjalan dengan baik (Prasetya, 2015). SDM yang berkompeten juga berpengaruh pada kualitas dari laporan keuangan, sebab jika SDM nya tidak berkompeten maka akan menghambat dalam penyajian laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan pengalaman dan pengetahuan atau kompetensi dari SDM-nya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadirsyah dan Abdullah (2016), menemukan bukti bahwa kompetensi pejabat pengelola keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Kemudian didukung dengan penelitian yang dilakukan Lasmana dan Rahayu (2016) yang menemukan bukti bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016), Wati, dkk (2014) dan Nadir dan Hasyim (2017) yang menemukan bukti bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga penelitian yang dilakukan oleh Cahyandari (2017), menemukan bukti bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian di atas peneliti merumuskan hipotesis 1, sebagai berikut:

H_1 : Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern diperlukan, karena jika tidak ada SPI dalam organisasi, maka banyak terjadi kecurangan yang tidak dapat dideteksi dalam organisasi tersebut. Sistem pengendalian intern ini

dianggap mampu memberikan informasi keuangan yang andal karena berisi kebijakan serta prosedur yang dipakai untuk mencapai sasaran dari organisasi tersebut. Dalam pemerintahan daerah juga memerlukan SPI yaitu SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penggelapan (*fraud*) terutama dalam pengelolaan laporan keuangannya. Karena pemerintahan bekerja untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi atau individu (Nurillah, 2014). Variabel ini diukur dengan seberapa besar tingkat pengungkapan *fraud* dalam SKPD Kabupaten Tasikmalaya.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014), menemukan bukti bahwa SPIP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar. Kemudian didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Surastiani dan Handayani (2015), yang menemukan bukti bahwa SPI memiliki pengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016), menemukan bukti bahwa SPI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016) yang menemukan bukti bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian di atas peneliti merumuskan hipotesis 2, sebagai berikut:

H_2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah harus mengacu dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berpedoman pada SAP. Standar akuntansi pemerintahan ini merupakan dasar yang memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jika pada saat penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah tidak mengacu pada SAP, maka laporan keuangan tersebut menjadi tidak andal dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak layak untuk dipublikasikan ke masyarakat (Langelo dkk, 2015).

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014), membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar. Kemudian didukung oleh penelitian Riyanti (2017), Cahyandari (2017) yang menemukan bukti bahwa standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Didukung dengan penelitian yang dilakukan Wati, dkk (2014), Nugraeni dan Budiantara (2015) yang

menemukan bukti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inapty dan Martiningsih (2016) yang menemukan bukti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Dari uraian di atas peneliti merumuskan hipotesis 3, sebagai berikut:

H_3: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengawasan keuangan daerah

Pengawasan keuangan daerah diperlukan agar pemerintah daerah dapat berjalan seperti rencana yang telah ditetapkan serta perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak ada pengawasan, maka bisa saja rencana yang telah disusun tersebut tidak berjalan secara efektif dan efisien. Pengawasan ini dilakukan dari mulai penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban APBD agar selama proses tersebut tidak terjadi kecurangan atau ketidak-sesuaian pada rencana yang telah ditentukan serta ketidak-sesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pengawasan keuangan daerah ini dapat mengurangi tingkat kecurangan yang dapat dilakukan karyawan di pemerintah daerah (Armando, 2013).

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nadirsyah dan Abdullah (2016), menemukan bukti bahwa pengawasan keuangan secara bersama-sama dan terpisah memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan SKPD. Kemudian didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiswara dkk (2014) yang menemukan bukti bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian di atas peneliti dapat merumuskan hipotesis 4, sebagai berikut:

H_4: Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Model Penelitian

Dari uraian di atas, maka hubungan variabel-variabel bebas (variabel independen) dengan variabel terikat (variabel dependen) pada penelitian ini bisa diringkas dengan:

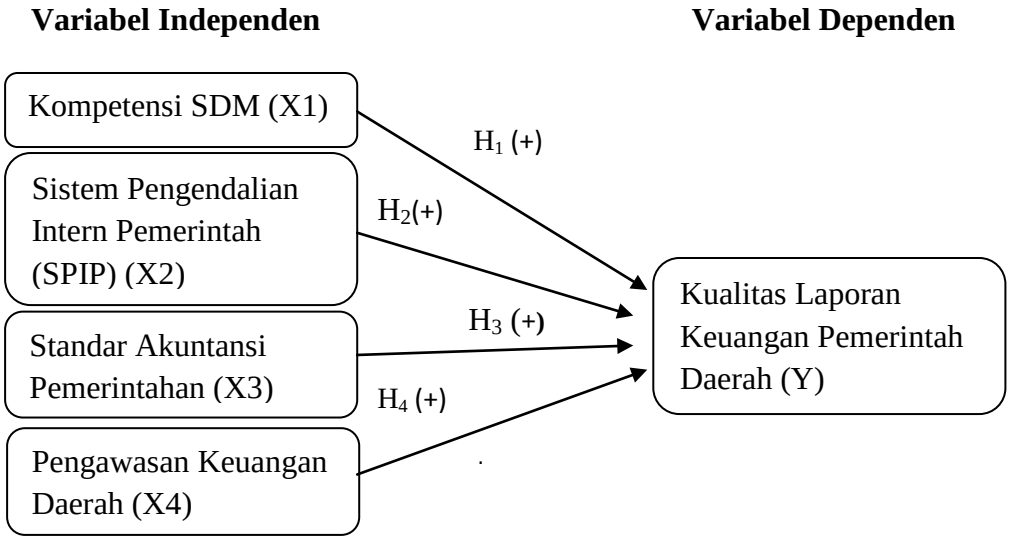

Gambar 2.1
Model Penelitian